

IMPLEMENTASI PROGRAM STRATEGI PENGEMBANGAN SAPI MADURA BIBIT SECARA SIMULTAN (SANG SULTAN) DI KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN

Restia Nova Aprilita¹, Tauran²

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya

E-mail: *restianova.21071@mhs.unesa.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana implementasi Program SANG SULTAN di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Program SANG SULTAN ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Nomor 188/24.2/432.309/2019. Permasalahan yang dihadapi adalah produktivitas Sapi Madura rendah (*calving interval/jarak beranak cenderung panjang*), tingkat adopsi teknologi Inseminasi Buatan masih rendah dikarenakan peternak yang cenderung menggunakan teknik kawin alami, dan jumlah akseptor IB di wilayah sumber bibit masih rendah dibandingkan jumlah betina produktif. Penelitian ini dilakukan di dua lokasi yaitu Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan dan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Subjek pada penelitian ini adalah pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan yang bertugas dan berwenang dalam pelaksanaan Program SANG SULTAN dan kelompok tani di Kecamatan Pakong yang menerima Program SANG SULTAN di Kabupaten Pamekasan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini kemudian dianalisis berdasarkan teori Model Implementasi Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada implementasi Program SANG, Informasi yang disampaikan pada para pelaksana dirasa telah jelas dan dapat dipahami dengan baik oleh pelaksana yang terlibat namun kelompok tani sempat mengalami kesulitan dalam memahami informasi secara utuh di awal. Para pelaksana telah memiliki kompetensi yang sudah cukup mumpuni namun personil yang dimiliki masih kurang mencukupi dari segi kuantitas. Fasilitas yang dimiliki juga masih belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Program SANG SULTAN telah diimplementasikan di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan namun masih memiliki hambatan dalam pelaksanaannya.

Implementasi, SANG SULTAN, Sapi Madura

Kata kunci

ABSTRACT

*This study is a qualitative study that aims to determine and analyze how the SANG SULTAN Program is implemented in Pakong District, Pamekasan Regency. The SANG SULTAN Program was established through the Decree of the Head of the Food Security and Livestock Service Number 188/24.2/432.309/2019. The problems encountered are low Madura cattle productivity (*calving interval/calving interval tends to be long*), low adoption rate of artificial insemination technology because farmers tend to use natural mating techniques, and the number of AI acceptors in the seed source area is still low compared to the number of productive females. This research was conducted in two locations, namely the Office of the Food Security and Agriculture Agency of Pamekasan Regency and Pakong District, Pamekasan Regency. The subjects of this study were employees of the Food Security and Agriculture Agency of Pamekasan Regency who were in charge of and authorized to implement the SANG SULTAN Program and farmer groups in Pakong District who received the SANG SULTAN Program in Pamekasan Regency. Data collection was carried out using observation, interviews, and documentation methods. This study was then analyzed based on Edward III's Implementation Model theory. The results of the study show that in the implementation of the SANG SULTAN Program, the information conveyed to the implementers was considered clear and well understood by the implementers involved, but the farmer*

groups had difficulty understanding the information in its entirety at the beginning. The implementers had sufficient competence, but the number of personnel was still insufficient. The facilities available were also still inadequate to meet the needs properly. Thus, it can be concluded that the SANG SULTAN Program in Pakong Subdistrict, Pamekasan Regency, still faces obstacles in its implementation.

Keywords

Implementation, SANG SULTAN, Madura cattle

1. PENDAHULUAN

Dari beberapa jenis sapi potong lokal di Indonesia, Sapi Madura adalah jenis sapi potong lokal berukuran kecil dan salah satu plasma nutfah sapi potong asli yang rentan terhadap lingkungan agroekosistem kering dan berkembang dengan baik di Pulau Madura (Agustina dan Hidayati, 2022). Kementerian Pertanian menetapkan bahwa Sapi Madura sebagai rumpun ternak lokal di Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3735/Kpts/HK.040/11/2010 Tentang Penetapan Rumpun Sapi Madura. Sapi Madura sebagai salah satu rumpun sapi lokal Indonesia yang merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Keberadaan Sapi Madura menjadikan komoditas sapi sebagai komoditas ternak unggulan strategis yang penting untuk kehidupan orang banyak, jaminan pemenuhan perolehan pangan, perlindungan, dan dinamisasi kehidupan desa secara berkelanjutan, serta preservasi dan stabilisasi sosial-politik (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2019).

Saat ini, Kabupaten Pamekasan telah ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit Sapi Madura dalam Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/173/432.131/2015 Tentang Penetapan Kawasan Pembibitan Sapi Madura yang menetapkan bahwa Kecamatan Pakong, Pasean, Batumarmar, dan Waru, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah sumber bibit Sapi Madura.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kemudian menetapkan Program Strategi Pengembangan Sapi Madura Bibit Secara Simultan (SANG SULTAN). Program SANG SULTAN sebagai produk kebijakan publik dibuat untuk meningkatkan populasi dan produktivitas sapi madura serta mendukung percepatan swasembada daging sapi di Kabupaten Pamekasan. Program SANG SULTAN ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Nomor 188/24.2/432.309/2019 Tentang Penetapan Program Unggulan SANG SULTAN. Program SANG SULTAN dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan tepatnya di wilayah sumber bibit Sapi Madura yaitu di Kecamatan Pakong, Kecamatan Pasean, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Waru.

Pada pelaksanaan Program SANG SULTAN masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang dihadapi adalah produktivitas Sapi Madura rendah (*calving interval/jarak beranak cenderung panjang*). Tingkat adopsi teknologi Inseminasi Buatan masih rendah dikarenakan peternak yang cenderung menggunakan teknik kawin alami, jumlah akseptor IB di wilayah sumber bibit masih rendah dibandingkan jumlah betina produktif (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan, 2021).

Pelaksanaan kebijakan tentang Program SANG SULTAN harus dilakukan secara tepat sasaran dan berdaya guna sehingga akan membantu memecahkan suatu masalah yang ada (Mansur, 2021). Butuh pengawasan dan perhatian lebih dalam implementasi kebijakan sehingga dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan di dalamnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait implementasi Program Strategi Pengembangan Sapi Madura Bibit Secara Simultan (SANG SULTAN) di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Dengan demikian penelitian ini kemudian

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi Program SANG SULTAN di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada persepsi terhadap suatu fenomena dan menghasilkan analisis deskriptif dalam bentuk kalimat dari objek penelitian (Sahir, 2021). Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini mendeskripsikan suatu fenomena dengan data akurat yang dipelajari secara sistematis (Sahir, 2021). Subjek pada penelitian ini adalah pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan yang bertugas dan berwenang dalam pelaksanaan Program SANG SULTAN dan kelompok tani di Kecamatan Pakong yang menerima Program SANG SULTAN.

Penelitian ini akan difokuskan pada Implementasi Program Strategi Pengembangan Sapi Madura Bibit Secara Simultan (SANG SULTAN) di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang kemudian dianalisis berdasarkan teori Model Implementasi Edward III. Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data Model Miles dan Huberman yang terdiri dari 4 tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Strategi Pengembangan Sapi Madura Bibit Secara Simultan (SANG SULTAN) merupakan program unggulan yang dicanangkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2019 dengan uji coba selama setahun dan resmi diimplementasikan pada tahun 2020 oleh DKPP Kabupaten Pamekasan dimana implementasinya disinergikan dengan kearifan lokal. Pelaksanaan Program SANG SULTAN ini melibatkan para peternak, kelompok tani, masyarakat serta instansi terkait (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan, 2021).



Gambar 1. Logo Program SANG SULTAN

Sumber: DKPP Kabupaten Pamekasan, 2024

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menetapkan Program Strategi Pengembangan Sapi Madura Bibit Secara Simultan (SANG SULTAN) melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Nomor 188/24.2/432.309/2019 Tentang Penetapan Program Unggulan SANG SULTAN yang ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2019. Program SANG SULTAN merupakan gabungan dari tiga program inovasi secara simultan yaitu Program Inseminasi Buatan Satu Tahun Satu Kelahiran Pada Ternak Sapi (Intan Satu Saka) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/315.A/441.112/2008 Tentang Penetapan Program Unggulan Satu Tahun Satu Kelahiran Pada Ternak Sapi; Program Seleksi Sapi Bibit Terintegrasi Ala Pakong, Pasean, Batumarmar, dan Waru (Siii PAPABARU) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Pamekasan Nomor 188/36.C/432.309/2017 Tentang Penetapan Program Unggulan Siii PAPABARU Kabupaten Pamekasan Tahun 2017; dan Program Tim Bunting dan Lahir Serentak untuk penjaringan (TIM BUSER) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Pamekasan Nomor 188/23.A/32.309/2018 Tentang Penetapan Program Unggulan TIM BUSER Kabupaten Pamekasan Tahun 2018.

Program SANG SULTAN dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan tepatnya di wilayah sumber bibit Sapi Madura yaitu di Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Pakong, Kecamatan Pasean, dan Kecamatan Waru. Pola pemeliharaan peternak di wilayah sumber bibit relatif homogen dengan kebiasaan memajang sapi bersama-sama dalam satu kelompok. Kearifan lokal tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan Program SANG SULTAN. Empat Kecamatan tersebut telah ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit Sapi Madura dalam Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/173/432.131/2015 Tentang Penetapan Kawasan Pembibitan Sapi Madura.

Program SANG SULTAN bertujuan mengoptimalkan masa produktif ternak, meningkatkan kualitas genetik Sapi, menjaring sapi betina produktif agar dapat kawin serentak, bunting, dan lahir serentak. Output yang diharapkan adalah peningkatan populasi, produktivitas serta kesejahteraan peternak. Saat ini, Program SANG SULTAN memiliki lima kegiatan utama yaitu, Inseminasi Buatan dan Pembinaan Kawin Alam, Pemeriksaan Kebuntingan Massal, Pelayanan Kelahiran Pedet, Penjaringan dan Uji Performan atau *Recording*/Pencatatan Ternak, dan Penerbitan SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit). Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan sistem pembiakan, memilih sapi-sapi produktif sehingga dapat dikawinkan secara bersamaan, hamil dan melahirkan secara bersamaan (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan, 2021).

Pelaksanaan program SANG SULTAN dilaksanakan oleh Paramedik Veteriner, Medik Veteriner, Asisten Teknik Reproduksi, Tim penilai layak bibit, Tim Recorder, Tim Uji Performans Bibit Sapi Maduran dan Penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Pamekasan Nomor 188/24.2/432.309/2019 Tentang Penetapan Program Unggulan Sang Sultan (Strategi Pengembangan Sapi Madura Bibit Secara Simultan) Kabupaten Pamekasan Tahun 2019.

Implementasi Program SANG SULTAN di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan setelah dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III sebagai berikut:

a. Komunikasi

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi. Kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Menurut Edwards persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang

melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan keputusan kebijakan dan perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu dapat diikuti (Situmorang, 2016):

1) Transmisi

Ditinjau dari saluran informasi pada pelaksanaan Program SANG SULTAN, transmisi informasi dapat dikatakan sudah cukup baik. Dalam lingkup internal DKPP dan antar OPD, transmisi informasi dilakukan melalui rapat atau koordinasi yang dilakukan setiap awal tahun, triwulan dan perbulan. Dalam kegiatan rapat, para pelaksana akan melakukan evaluasi program dengan melihat hambatan-hambatan yang ada serta kebijakan yang akan diambil. Selain melalui rapat, transmisi informasi di lingkup antar pelaksana juga menggunakan platform digital seperti aplikasi Whatsapp group, Instagram, dan Pesan.

Dalam lingkup eksternal dengan para peternak atau kelompok tani, transmisi informasi dilakukan dengan kegiatan penyuluhan atau forum group discussion yang dilakukan secara terjadwal setiap bulannya. Penyuluhan ini memuat informasi mengenai inseminasi buatan, jarak kelahiran, pakan ternak, gangguan reproduksi, festival ternak, vaksin gratis, dan sebagainya. Informasi yang disampaikan terkadang mengalami keterlambatan namun tetap dapat disampaikan dengan baik kepada kelompok tani. Dengan demikian, arahan atau keputusan yang dibuat dapat disalurkan dan diterima dengan baik oleh para pelaksana dan pihak lain yang terlibat. Kelompok tani atau peternak juga dapat menerima informasi mengenai Program SANG SULTAN dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Setyawan & Suhardjono (2017) dimana seluruh pelaksana yang bersangkutan memiliki tanggungjawab yang sama dalam pengimplementasian kebijakan ini, pelaksana sebagai komunikator harus menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan berbagai cara, agar kebijakan ini dapat diterima dan diterapkan secepatnya.

2) Kejelasan

Ditinjau dari unsur kejelasan, informasi yang disampaikan mengenai Program SANG SULTAN di Kecamatan Pakong sudah terasa cukup jelas. Dalam komunikasi internal, informasi yang disampaikan pada para pelaksana dirasa telah jelas dan dapat dipahami dengan baik oleh pelaksana yang terlibat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Setyawan dkk (2021) bahwa pesan atau gagasan yang dimuat dalam sebuah kebijakan yang telah melalui proses encoding dimana harus disosialisikan dengan baik dan teknik sosialisasi yang digunakan harus mudah di mengerti sehingga maksud dan tujuan kebijakan dapat diterima, dipahami serta dipatuhi. Namun hal tersebut tidak berlaku pada komunikasi eksternal dengan kelompok tani. Pada awalnya peternak mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang disampaikan oleh pelaksana sehingga informasi tersebut tidak dapat dipahami dengan baik. Namun seiring berjalannya waktu, peternak dapat memahami dengan jelas informasi yang disampaikan mengenai Program SANG SULTAN. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informasi yang disampaikan mengenai Program SANG SULTAN sudah jelas namun terdapat hambatan pada peternak untuk memahami informasi tersebut.

3) Konsistensi

Ditinjau dari faktor konsistensi, informasi yang disampaikan mengenai Program SANG SULTAN di Kecamatan Pakong sudah konsisten. Dalam komunikasi internal maupun eksternal, informasi yang disampaikan sangat konsisten dan tidak berubah-ubah. Tidak adanya perintah atau arahan yang saling bertentangan atau bertabrakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Setyawan dkk (2021) yang menyampaikan bahwa seluruh pelaksana kebijakan harus mensosialisasikan secara konsisten terkait aturan, dan arahan

karena secara teknis mereka yang lebih memahami kebijakan tersebut, sehingga dapat dilaksanakan dan diteruskan ke proses sosialisasi yang jelas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsistensi informasi yang disampaikan mengenai Program SANG SULTAN sudah baik.

b. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya dibutuhkan agar pelaksanaan kebijakan publik dapat dilakukan dengan cermat, baik, dan konsisten, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Afandi dan Warjio (dalam Ravyansah et al., 2022) menyatakan sumber daya merupakan faktor penting untuk keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan publik, yang meliputi staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya. Artinya, tanpa dukungan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan publik tidak akan dapat diwujudkan dan memberikan solusi dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat. Terdapat beberapa elemen dalam indikator sumberdaya ini, antara lain (Situmorang, 2016):

1) Pegawai/Staf

Jika ditinjau dari segi kualitas para pelaksana Program SANG SULTAN, kemampuan pelaksana dalam menyelesaikan tugas dapat dikatakan sudah baik. Para pelaksana telah memiliki kompetensi yang sudah bagus. Kompetensi yang dimiliki personil sudah sesuai dengan kebutuhan untuk mengimplementasikan Program SANG SULTAN. Petugas yang dipilih juga diwajibkan untuk mengikuti diklat atau pelatihan dan membidangi dalam kegiatan yang dilakukan seperti petugas IB dan paramedis. Para personil di Kecamatan Pakong juga sudah mengantongi izin berupa Surat Izin Praktik (SIP), Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan (SIPP) dan Surat Izin Melaksanakan Inseminasi (SIM-I).

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat hambatan dimana personil yang dimiliki masih kurang mencukupi dari segi kuantitas. Jumlah personil yang dimiliki masih jauh jika dibandingkan dengan rasio peternak yang ada. Personil yang bertugas memberikan pelayanan Di Kecamatan Pakong hanya tersisa 2 paramedis dengan 1 penyelia. Oleh karena itu, kegiatan pelayanan terkadang harus tertunda sehingga tidak dapat berjalan dengan efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahmatillah dkk (2023) bahwa dalam penyelenggaraan kebijakan tentunya ada banyak hal yang harus ditangani, dengan terbatasnya sumber daya manusia maka akan menjadikan kebijakan tersebut menjadi kurang efisien. Apabila implementor kekurangan sumberdaya manusia untuk melaksanakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, ketersediaan personil yang bertugas harus diperhitungkan dengan baik. Dalam pengimplementasian Program SANG SULTAN di Kecamatan Pakong, para personil telah memiliki kompetensi dan keterampilan di bidangnya namun secara kuantitas masih kekurangan personil atau petugas di lapangan.

2) Wewenang

Dalam pengimplementasian Program SANG SULTAN, DKPP Kabupaten Pamekasan telah memiliki wewenang atau legitimasi yang diberikan. Wewenang tersebut diberikan kepada DKPP Kabupaten Pamekasan selaku pelaksana Program SANG SULTAN yang telah diatur melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Pamekasan Nomor 188/24.2/432.309/2019 tentang Penetapan Program Unggulan SANG SULTAN Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nomor 188/5.1/432.309/2024 tentang Pelaksanaan Inovasi SANG SULTAN Kabupaten Pamekasan Tahun 2024. Wewenang DKPP dalam Program SANG SULTAN sudah baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana pendapat Hirawan (2022) bahwa pelaksana dalam menjalankan tugasnya

yang memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan kebijakan tersebut sepenuhnya tanpa terpengaruh oleh pihak lainnya yang dapat menghambat keberhasilan implementasi.

3) Informasi

Informasi mengenai petunjuk untuk melaksanakan Program SANG SULTAN telah disediakan melalui SOP Pelayanan Inovasi SANG SULTAN yang memuat alur pelaksanaan kegiatan. SOP tersebut kemudian menjadi acuan petugas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan di Kecamatan Pakong selama ini. Informasi lain seperti ketaatan personil diperoleh melalui laporan petugas saat melakukan pelayanan di lapangan yang diakses melalui Aplikasi iSIKHNAS secara online dan real time. Pengawasan juga dilakukan oleh koordinator upt yang kemudian dilaporkan kepada koordinator kabupaten. Informasi tersebut juga terkadang diperoleh melalui laporan masyarakat terhadap para personil ataupun petugas selama pelaksanaan kegiatan pelayanan dan survei selama pengimplementasian Program SANG SULTAN di Kecamatan Pakong. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sumber daya informasi pada Program SANG SULTAN telah memadai.

4) Fasilitas

Ditinjau dari ketersediaan peralatan dan perlengkapan, fasilitas yang tersedia dalam pengimplementasian Program SANG SULTAN di Kecamatan Pakong dapat dikatakan masih belum cukup memadai. Fasilitas yang dimiliki dalam Program SANG SULTAN masih belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan. Sarana prasarana yang tersedia seperti bangunan pusat kesehatan hewan dan peralatan yang digunakan oleh petugas di lapangan masih kurang memadai. Perlengkapan seperti handscoon atau masker pun masih belum memadai. Bangunan Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Pakong juga tidak layak dan kurang mendapatkan perawatan. Alat dan bahan yang digunakan seperti handscoon dan semen sapi cair sudah disediakan oleh DKPP masih belum bisa dikatakan cukup. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa fasilitas yang dimiliki masih belum memadai jika dibandingkan dengan fasilitas yang dibutuhkan selama pengimplementasian Program SANG SULTAN di Kecamatan Pakong.

c. Disposisi

Disposition atau sikap dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai peran penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit (Situmorang, 2016).

Ditinjau dari sikap pelaksana, dapat dikatakan disposisi pada Program SANG SULTAN sudah cukup bagus. Sikap para pelaksana sangat terbuka dan tidak ada penolakan terhadap adanya Program SANG SULTAN. Para petugas sudah berkomitmen terhadap segala kegiatan yang akan ditugaskan selama di lapangan. Dukungan penuh ditunjukkan oleh para pelaksana melalui komitmen kerja. Para pelaksana mengharapkan dengan adanya Program SANG SULTAN maka harga jual sapi naik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun tentunya tetap perlu adanya dorongan untuk meningkatkan komitmen pelaksana. Peningkatan komitmen tersebut dilakukan dengan diadakannya perjanjian kerja untuk mencapai target yang sudah ditentukan selama pengimplementasian Program SANG SULTAN di Kecamatan Pakong.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para pelaksana mendukung penuh adanya Program SANG SULTAN. Hal ini sesuai dengan pendapat Setyawan dkk (2021)

yang mengatakan bahwa implementasi suatu kebijakan akan berjalan efektif dan sesuai rencana apabila seluruh pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang jelas atau tahu bagaimana mengambil sikap sebagai bagian yang memiliki tanggungjawab penyelengaraan di masing-masing tempat yang menjadi tugas dan kewenangan sebagaimana peraturan yang sudah ditetapkan.

Dalam disposisi terdapat beberapa hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pengangkatan birokrat, dan insentif (Situmorang, 2016).

1) Pengangkatan Birokrat

Ditinjau dari pengangkatan birokrat, Program SANG SULTAN melakukan pengangkatan dan pemilihan personel dengan melihat apakah personil yang akan dipilih memiliki keinginan untuk menjadi pelaksana atau tidak. Personil yang dipilih diharuskan untuk memenuhi kualifikasi untuk menjadi petugas atau pelaksana serta mengikuti regulasi dengan menandatangani pakta integritas. Pemilihan personil juga didasarkan pada linier bidang yang ditempatkan dan tingkat pendidikan personil yang akan dipilih serta memiliki kompetensi di bidangnya. Penempatan personil di lapangan didasarkan pada domisili masing-masing. Dengan demikian dapat dilihat bahwa personil yang dipilih merupakan personil yang memiliki dedikasi dan kompetensi yang mumpuni sehingga dapat dikatakan bahwa pengangkatan birokrat pada Program SANG SULTAN sudah bagus.

2) Insentif

Dalam pengimplementasian Program SANG SULTAn, insentif kepada personil diberikan dalam bentuk reward dan penghargaan. Penghargaan dan reward tersebut diberikan oleh Dinas dengan sistem perhitungan jumlah pelayanan yang paling banyak dilakukan atau tingkat kebuntingan sapi yang paling tinggi tiap petugas dan tiap upt. Para peternak juga terkadang memberikan insentif kecil kepada personil yang bertugas yang telah melakukan pelayanan dengan baik. Dengan adanya penghargaan dan *reward* tersebut memungkinkan untuk mendorong kinerja personil. Selain adanya penghargaan dan *reward*, punishment juga diberlakukan kepada para personil. Punishment tersebut diberlakukan sebagai bentuk kontrol terhadap petugas di lapangan.

Hal tersebut selaras dengan pendapat Hirawan (2022) bahwa untuk memperoleh dukungan yang maksimal dari kecenderungan sikap pelaksana, pemberian insentif dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat positif berupa pemenuhan kepentingan pribadi (*self interest*) hingga pengenaan sanksi sanksi yang dipandang dapat memperbaiki dan menimbulkan dukungan sikap positif para pelaksana kebijakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa insentif yang diberikan kepada personil sudah cukup baik untuk membantu meningkatkan kinerja dan diberlakukannya *punishment* sebagai bentuk kontrol terhadap pelaksana dalam pengimplementasian Program SANG SULTAN.

d. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur kerja atau sering disebut sebagai Standar Operating Procedurs (SOP) dan fragmentasi (Situmorang, 2016).

1) Standar Operating Procedurs (SOP)

Pada Program SANG SULTAN, SOP atau prosedur kerja yang telah dibuat sudah memadai. Program SANG SULTAN telah memiliki 6 SOP yang kemudian mengatur tentang Pelayanan Inovasi SANG SULTAN, Pelayanan Inseminasi Buatan, Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan, Pelayanan Kelahiran dan Uji Performans Bibit Sapi Madura. SOP tersebut kemudian menjadi patokan pelaksana atau petugas yang bekerja selama pelaksanaan Program SANG SULTAN dan hingga saat ini belum ada keluhan mengenai SOP tersebut. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh personil atau petugas sudah sesuai SOP yang berlaku

sehingga adanya keseragaman tindakan personil selama di lapangan. Hal ini juga selaras dengan pendapat Rahmatillah dkk (2023) bahwa dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragami tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dalam penerapan kebijakan.

2) Fragmentasi

Ditinjau dari persebaran tanggung jawab dan koordinasi para pihak yang terlibat, fragmentasi pada Program SANG SULTAN di Kecamatan Pakong dapat dikatakan sudah cukup baik. Pihak DKPP yang terlibat dalam pelaksanaan Program SANG SULTAN yakni Bidang Produksi Peternakan dengan Bidang Kesehatan Hewan telah terjalin keselarasan dengan adanya koordinasi rutin yang disesuaikan dengan linear bidang masing-masing. Pada lingkup antar pelaksana, persebaran tanggung jawab dan kewenangan disesuaikan dengan jabatan masing-masing dalam Program SANG SULTAN. Struktur birokrasi disini berperan penting dan berpengaruh besar terhadap berjalannya program. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan yang menunjukkan spesialisasi pekerjaan (Maunde dkk. 2021). Selain kedua bidang tersebut, instansi lain seperti Bapperida, Balai Penyuluhan Pertanian, pemerintah Kecamatan Pakong, perangkat desa bahkan komunitas seperti paguyuban sapi juga ikut terlibat. Tentunya pihak-pihak tersebut telah melakukan koordinasi bersama para pelaksana Program SANG SULTAN. Dengan demikian dapat dilihat bahwa persebaran tanggung jawab telah sesuai dengan struktur birokrasi yang ada dan adanya koordinasi antar pihak yang terlibat dalam Program SANG SULTAN.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa kesimpulan utama:

- a. Penyaluran informasi yang terjadi pada Program SANG SULTAN dapat berjalan dengan baik. Pada Program SANG SULTAN telah dilakukan rapat dan penyuluhan yang sudah diagendakan dengan baik. Dengan demikian, arahan atau keputusan yang dibuat dapat disalurkan dan diterima dengan baik oleh para pelaksana, peternak dan pihak lain yang terlibat. Pada proses komunikasi, informasi yang disampaikan mengenai Program SANG SULTAN di Kecamatan Pakong sudah terasa cukup jelas namun masih ada sedikit hambatan. Informasi yang disampaikan pada para pelaksana dirasa telah jelas dan dapat dipahami dengan baik oleh pelaksana yang terlibat namun kelompok tani sempat mengalami kesulitan dalam memahami informasi secara utuh di awal. Selain dari kejelasan informasi, terdapat faktor konsistensi informasi yang disampaikan mengenai Program SANG SULTAN di Kecamatan Pakong yang dimana saat ini sudah konsisten. Dalam komunikasi internal maupun eksternal, informasi yang disampaikan sangat konsisten dan tidak berubah-ubah. Tidak adanya perintah atau arahan yang saling bertentangan atau bertabrakan.
- b. Dalam pengimplementasian Program SANG SULTAN di Kecamatan Pakong, para personil telah memiliki kompetensi dan keterampilan di bidangnya namun masih perlu adanya penambahan personil atau petugas di lapangan. Para pelaksana telah memiliki kompetensi yang sudah cukup mumpuni namun personil yang dimiliki masih kurang mencukupi dari segi kuantitas. Jumlah personil yang dimiliki tidak sebanding dengan beban kerjanya. Aspek lain dari sumberdaya adalah kewenangan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan telah memiliki wewenang dalam melaksanakan Program SANG SULTAN terutama di wilayah Kecamatan Pakong. Selain kewenangan, terdapat aspek lainnya yaitu informasi dan fasilitas. Sumber daya informasi pada Program SANG SULTAN telah memadai. Informasi dapat diakses dengan baik oleh para pelaksana. Jika melihat dari aspek fasilitas, fasilitas yang dimiliki untuk pengimplementasian Program SANG SULTAN di Kecamatan Pakong masih belum cukup memadai. Fasilitas yang dimiliki dalam masih belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan dengan baik.

- c. Dintinjau dari sikap pelaksana, dapat dikatakan disposisi pada Program SANG SULTAN sudah cukup bagus. Sikap para pelaksana sangat terbuka dan tidak ada penolakan terhadap adanya Program SANG SULTAN. Para petugas sudah berkomitmen terhadap segala kegiatan yang akan ditugaskan selama di lapangan. Pada Program SANG SULTAN, pengangkatan birokrat yang dilakukan sudah terbilang baik. Personil yang dipilih merupakan personil yang memiliki dedikasi dan kompetensi yang mumpuni di bidangnya. Dalam aspek insentif, petugas menerima insentif dengan bentuk penghargaan dan reward atau hadiah yang diberikan oleh Dinas dan Peternak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa insentif yang diberikan kepada personil sudah cukup baik untuk membantu meningkatkan kinerja.
- d. Pada Program SANG SULTAN, SOP atau prosedur kerja yang telah dibuat sudah memadai. Program SANG SULTAN telah memiliki enam SOP terkait kegiatan pelayanan pada Program SANG SULTAN. Dalam aspek fragmentasi, persebaran tanggung jawab dan koordinasi para pihak yang terlibat pada Program SANG SULTAN di Kecamatan Pakong dapat dikatakan sudah cukup baik. Persebaran tanggung jawab telah sesuai dengan struktur birokrasi yang ada mengikuti tugas pokok masing masing dan adanya koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat dalam Program SANG SULTAN di Kecamatan Pakong.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D.K. dan Hidayati, N. (2022). Keragaman Fenotip Sapi Madura dari Perspektif Budaya di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ilmu Peternakan dan Veteriner Tropis. Journal of Tropical Animal and Veterinary Science*, 12(1), hal. 30–35. doi:10.46549/jipvet.v12i1.181.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan (2019). *Laporan Akhir Penyusunan One Village One Product Kabupaten Pamekasan*.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan (2021). *Ringkasan Inovasi SANG SULTAN (Strategi Pengembangan Bibit Sapi Madura Secara Simultan)*. Pamekasan: DKPP Kabupaten Pamekasan.
- DKPP Kabupaten Pamekasan (2024) KIPP Fisibilitas SANG SULTAN 2024.
- Hirawan, Z. (2022). Implementasi Kebijakan E-Samsat Di Kantor Samsat Haurgeulis. *Jurnal Studi Administrasi Publik*, 7(2), hal. 28–40.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. *AT-TAWASSUTH:Jurnal Ekonomi Islam*, VI(Ii), hal. 324–334.
- Rahmatillah, A., Alqarni, W. dan Afrijal (2023). Implementasi Program Aceh Green Ditinjau Dari Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Edward III. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8(3).
- Ravyansah, Purba, S., Irawan, B., Fathur, A., Purnama, E., Wiwin, K., Sudiartini, N. W. A., Haris, A., Suwardi, A, M. D. S., & Sari, D. (2022). Kebijakan Publik. *Padang: Global*

Eksekutif Teknologi.

- Sahir, S. H. (2021). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Setyawan, D., NC, A.P. dan Firdausi, F. (2021). Model George Edward Iii : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. *Jurnal Politik, Sosial & Kebijakan Publik (Publicio)*, 3(2), hal. 9–19.
- Situmorang, C. H. (2016). Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). *Depok: Social Security Development Institute (SSDI)*.
- Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/173/432.131/2015 Tentang Penetapan Kawasan Pembibitan Sapi Madura
- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3735/Kpts/HK.040/11/2010 Tentang Penetapan Rumpun Sapi Madura